

KEGIATAN DPR-RI AWAL JANUARI 2012

Kegiatan minggu ini diawali dengan Pembukaan Masa Persidangan III 2011-2012 pada 9 Januari 2012 Masa Sidang III akan ditutup pada tanggal 5 April 2012. Pada masa Sidang ini Dewan memiliki 62 hari kerja atau 88 hari kalender untuk melaksanakan tiga fungsi utama Dewan.

Berikut ini ringkasan pidato pembukaan sidang oleh Ketua DPR-RI.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Untuk tahun 2012 ini, DPR dan Pemerintah telah menetapkan 64 RUU sebagai prioritas tahunan, termasuk 16 RUU yang telah memasuki pembicaraan Tingkat I. Dari 16 RUU tersebut, 8 diantaranya telah mengalami perpanjangan masa tugas 2 sampai 3 kali. RUU tersebut antara lain, RUU tentang Keamanan Nasional, RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang Pendidikan Tinggi, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, dan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

Tahun 2011 yang lalu, DPR bersama Pemerintah telah menetapkan 91 RUU sebagai prioritas, yang telah diselesaikan sebanyak 25 RUU, termasuk 5 RUU kumulatif terbuka. Pencapaian itu belum optimal, karena dalam pelaksanaan fungsi legislasi, banyak kendala/tantangan yang dihadapi. Untuk menghasilkan RUU yang optimal, dibutuhkan waktu pembahasan yang cukup panjang, tidak cukup dua atau tiga kali masa sidang. Hal ini dilakukan demi menghasilkan RUU yang betul-betul mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan banyaknya RUU prioritas tahun 2012, Pimpinan Dewan meminta kepada seluruh anggota Dewan dan fraksi, untuk memanfaatkan tahun 2012 ini sebagai tahun legislasi. Anggota Dewan harus dapat mempergunakan waktu selama Masa Sidang III ini untuk menyelesaikan berbagai RUU prioritas.

Masa Persidangan III 2011-2012 ini, kegiatan Dewan dibagi dalam 2 (dua) kelompok, *pertama*, kegiatan legislasi



sebanyak 60%, dan *kedua*, kegiatan anggaran dan pengawasan sebesar 40%. Dua kelompok kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian per-minggu termasuk untuk alokasi bagi Rapat Paripurna, Rapat Fraksi, Rapat Badan-Badan, dan Rapat Tim. Alokasi kegiatan ini akan disesuaikan untuk Masa Persidangan I dan IV dalam membahas anggaran. Diharapkan, pola penjadwalan per-minggu ini memiliki manfaat agar: (i) anggota dewan bisa lebih fokus sehingga memungkinkan penyelesaian target RUU lebih cepat, (ii) minimalisasi *overlapping* sidang, (iii) administrasi/penyiapan bahan lebih mudah, dan (iv) durasi rapat lebih efektif.

Untuk RUU tentang Pemilu Legislatif, perlu ada target waktu penyelesaian yang jelas, sebab UU ini sangat penting bagi penyelenggaraan Pemilu 2014. Untuk menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas, diperlukan waktu yang memadai, diantaranya melakukan sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia terutama yang memiliki hak pilih.

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Pelaksanaan fungsi anggaran yang telah dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan APBN 2011 dan tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI tahun 2011. Banggar DPR juga telah melakukan pendalaman terhadap APBN tahun 2012, utamanya berkaitan dengan belanja modal.

Dalam evaluasi pelaksanaan APBN, masalah penyerapan anggaran, terutama belanja modal dalam APBN 2011, tidak optimal, sehingga tidak mampu menggerakkan perekonomian domestik dan sektor riil, serta membuka lapangan kerja. Serapan anggaran yang tidak optimal, menunjukkan adanya

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNG JAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

permasalahan dalam pengelolaannya. Beberapa aspek yang perlu dievaluasi antara lain, lemahnya perencanaan program dan kegiatan, lemahnya koordinasi antara unit perencanaan dan unit pelaksana kegiatan, dan lemahnya pelaksanaan kegiatan. Sejumlah kelemahan tersebut mengakibatkan sering dilakukannya revisi anggaran. Bila penyerapan menumpuk pada akhir tahun, akan ada kecenderungan mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.

Pada pelaksanaan APBN 2012, Dewan melihat bahwa tantangan yang akan dihadapi pada tahun ini lebih besar, mengingat kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. Belanja barang dan belanja modal seharusnya memperoleh porsi lebih besar, karena merupakan anggaran pembangunan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, APBN saat ini justru terlalu dibebani oleh biaya rutin dan biaya subsidi, sehingga perlu dipikirkan secara bertahap adanya pola penurunan biaya rutin dan biaya subsidi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan dapat menurun, jika pemerintah tidak mempersiapkan langkah-langkah yang terukur.

Lembaga Pemeringkat Hutang Internasional Fitch Rating telah memberikan *upgrade* terhadap peringkat hutang Indonesia dari BB+ menjadi BBB- yang berarti bahwa Indonesia menjadi negara yang layak untuk investasi. Dewan menghargai segala upaya dan kerja keras demi pencapaian peringkat layak investasi ini. Namun, Dewan memberi catatan bahwa peringkat tersebut tidak akan berarti banyak, jika upaya pemerataan hasil kinerja ekonomi tidak dapat dinikmati masyarakat luas. Ada 2 permasalahan utama yang harus diatasi segera, yaitu permasalahan infrastruktur dan ketidakpastian hukum. Perbaikan infrastruktur harus segera dilakukan, agar Indonesia tidak mengalami *middle income trap* dan dapat menjadi negara berpendapatan tinggi dan maju di masa mendatang. Ketidakpastian hukum harus ditangani dengan perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang adil.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Panja-panja yang telah dibentuk dan akan dibentuk, akan menangani persoalan-persoalan bangsa di bidang politik, penegakan hukum dan keamanan, ekonomi dan sosial-kemasyarakatan. *Pertama*, Keanggotaan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, akan diperkuat dengan penambahan anggota, masing-masing dari Komisi I, Komisi III, Komisi VII, dan Komisi IX.

Tim Pemantau Pemerintahan Aceh, akan melakukan pemantauan terhadap Pemilukada serentak di Provinsi Aceh dan 17 Kabupaten/Kota pada bulan Februari. Pemantauan dilakukan pada tahap persiapan maupun pelaksanaan. Di harapkan, Pemilukada ini berjalan dengan lancar sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang mengemban amanah rakyat.



Terkait pelaksanaan Otsus bagi Provinsi Papua, ditekankan bahwa pada respon situasi yang tidak kondusif di wilayah Papua dan Papua Barat, baik dari segi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan dan perlindungan hukum yang adil, baik bagi masyarakat Papua maupun para aparat keamanan, harus diperhatikan. Rakyat Papua harus terayomi dan terbela oleh Pemerintah, agar kecintaan terhadap NKRI tetap terjaga.

Terkait tugas Tim Pengawas Kasus Bank Century, BPK-RI telah memberikan laporan audit forensik pada tanggal 23 Desember 2011. Hasil laporan BPK ini, diharapkan dapat diperdalam oleh Tim Pengawas Century DPR-RI yang telah diperpanjang masa tugasnya. Audit forensik ini, oleh BPK juga telah disampaikan kepada lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Untuk lembaga-lembaga penegak hukum, hasil laporan BPK kiranya menjadi input untuk melangkah lebih jauh dalam penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini dengan kinerja yang lebih baik.

TEMA UMUM AKTUAL

Berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini, seperti kekerasan yang terjadi di Papua, Mesuji-Lampung dan Mesuji-Sumsel, Sape-Bima, maupun di Aceh, cukup memprihatinkan. Dewan melalui Komisi-Komisi DPR dipastikan akan memberikan perhatian dan melakukan tindak lanjut. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah memberikan panduan bagi aparat dalam melakukan pengamanan terhadap berbagai tindak kekerasan. Dengan demikian, aparat perlu mengedepankan pendekatan persuasif.

Salah satu akar permasalahan yang menimbulkan ben-trokan antara warga dan aparat adalah sengketa tanah. Permasalahan sengketa tanah menunjukkan bahwa UU tentang Agraria tidak dijalankan secara benar, terjadi tumpang

tindih antara regulasi di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan tata ruang. Pemerintah Daerah telah mengabaikan hak ulayat dan seringkali lahan-lahan yang disengketakan diklaim sebagai tanah negara. Permasalahan ini juga berkaitan dengan perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

Berkaitan dengan hal ini, DPR dan Pemerintah telah menyetujui disahkannya RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. UU ini mengedepankan asas-asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Berkaca pada praktik pengadaan tanah yang seringkali menciptakan ketegangan antara Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan masyarakat, diharapkan bisa terjawab oleh hadirnya UU ini.

Masalah lain adalah ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilu. Kasus terjadi "pecah kongsi" antara kepala daerah dan wakilnya, harus menjadi bahan pertimbangan bagi pembahasan RUU Pemilu. Dalam pembahasan diharapkan, ditemukan perbaikan sistem Pemilu yang baik dan mampu memberikan solusi. Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu dimaksudkan, untuk menempatkan mekanisme Pemilu secara demokratis di dalam konstruksi sistem Pemerintahan NKRI, memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, mereduksi konflik di daerah, serta meminimalisir aspek psiko-politik masyarakat di daerah. Di dalam UU Pemilu yang diharapkan lebih komprehensif ini, perlu pengaturan tentang pemilihan langsung Wakil Kepala Daerah dalam satu paket.

Menurut laporan Bawaslu, selama tahun 2011, setidaknya telah terjadi 1718 pelanggaran, 33% merupakan pelanggaran administrasi, 22% atau sebesar 372 kasus adalah pelanggaran pidana. Sisanya tidak ditangani lebih lanjut karena kurang cukup bukti atau kadaluarsa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan politik uang, PNS yang tidak netral, dan lain-lain. dari berbagai kasus ini, Komisi II DPR dan Panja Mafia Pemilu dapat mengevaluasi sehingga dapat menjadi masukan bagi pembahas RUU Pemilu.

Masalah lain yang perlu diperhatikan, adalah kemungkinan terjadinya banjir besar yang mengancam Jakarta dan sejumlah daerah di tanah air. Selain bencana banjir, ancaman lain seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus juga harus tetap diantisipasi. BNPB, BASARNAS, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pekerjaan Umum, harus waspada dan menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi jatuhnya korban serta kerugian materiil yang diakibatkan bencana. Langkah-langkah antisipasi pencegahan bencana agar lebih diutamakan daripada hanya antisipasi dampak bencana.

DPR-RI memberi apresiasi atas keberhasilan Indonesia di arena SEA Games ke-26 dan ASEAN Para Games ke-6. Namun, Pemerintah dan KONI diharapkan dapat memper-

siapkan diri, agar para atlet dapat mendulang prestasi di arena-arena yang lebih bergengsi, termasuk meningkatkan prestasi persepakbolaan Indonesia. Manajemen PSSI yang selalu kisruh selama ini, perlu mendapatkan solusi yang sebaik-baiknya. Kedepankan profesionalisme dan manajemen olahraga dengan baik, dan gunakan sains untuk peningkatan performa atlet.

DPR-RI juga memberikan apresiasi kepada anak-anak bangsa, siswa-siswa SMK yang telah menunjukkan kemampuan dalam memproduksi mobil Esemka yang potensial untuk dijadikan sebagai mobil nasional. Berbagai keberhasilan yang telah dicapai anak-anak bangsa ini, menumbuhkan semangat dan optimisme untuk mendorong kemajuan bangsa untuk lebih akseleratif.

KEGIATAN REGIONAL

Memasuki tahun 2012, Dewan berharap situasi internasional mengarah pada situasi kondusif. Diharapkan, iklim politik, keamanan dan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik khususnya, tetap terjaga, sehingga negara-negara di kawasan ini dapat terus melaksanakan pembangunan nasionalnya dengan baik sesuai dengan harapan rakyatnya. Pimpinan Dewan menyampaikan duka cita atas wafatnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il pada 17 Desember 2011. Namun diharapkan, situasi di Semenanjung Korea tetap terjaga baik, dan proses unifikasi Korea dapat kembali diupayakan.

Delegasi DPR dipimpin Wakil Ketua DPR-RI Pramono Anung, pada tanggal 8-12 Januari ini, tengah mengikuti Sidang *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* ke-20 di Tokyo, Jepang. Delegasi DPR bersama dengan anggota parlemen dari negara-negara Asia Pasifik lainnya, membahas berbagai isu aktual di kawasan dan dunia, seperti situasi di Semenanjung Korea dan Timur Tengah, kerja sama pencegahan bencana, isu perubahan iklim, pencapaian MDGs, situasi ekonomi global, dan lain-lain.

DPR-RI pada 24-31 Januari 2012, akan menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (PUIC) ke-7, di Palembang, Sumatera Selatan. Konferensi PUIC ini memiliki arti penting, karena merupakan Konferensi PUIC yang pertama diadakan di kawasan Asia Tenggara. Ketua DPR, akan menjadi Presiden PUIC untuk periode satu tahun kedepan.

Selain itu, Ketua DPR-RI sebagai Presiden ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* akan memenuhi undangan Presiden/Ketua *Pan-African Parliament*, untuk menghadiri Sidang *the Sixth Ordinary Session of Pan African Parliament* yang akan berlangsung 16-20 Januari 2012 di Addis Ababa, Ethiopia. Undangan ini dimaksudkan sebagai penghormatan antar-organisasi parlemen regional antara AIPA dan *Pan African Parliament (PAP)* dalam rangka peningkatan hubungan baik antar organisasi parlemen regional tersebut.*

Komisi X Kunjungi Kondisi Sekolah Yang Rusak di Kota Medan

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menaruh perhatiannya kepada sekolah-sekolah yang dalam kondisi rusak di beberapa daerah, salah satunya kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Rehabilitasi bangunan sekolah harus dilakukan dalam rangka perbaikan mutu pendidikan.

Ketua Komisi X Rully Chairul Azwar menjelaskan, bahwa DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menyelesaikan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. "Sekolah yang layak adalah syarat yang mendasar dalam rangka peningkatan jaminan mutu dari sekolah," Katanya.

Menurut Rully, untuk perbaikan sekolah telah diberikan dari dana DAK, BOS dan dana APBN melalui dana Dekon. Selain itu juga disediakan dana alokasi untuk kelas baru dan pembangunan baru tapi pada intinya adalah diprioritaskan untuk rehab ringan maupun berat.

Dalam Kunker Komisi X di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, mendapati Kondisi sekolah dalam kondisi Rusak berat maupun Ringan. Diantaranya SMP Negeri 20 Medan, SMA Negeri 10 Medan, dan SMK Negeri 6 Medan.

Komisi DPR yang membidang pendidikan, mengkhawatirkan kondisi sekolah yang rusak dapat membahayakan keselamatan juga mengganggu konsentrasi siswa. "di daerah perkotaan saja banyak ditemukan sekolah dalam kondisi rusak berat maupun ringan, apalagi sekolah yang letaknya di pelosok pedesaan," keluhnya.

Hal itu terjadi mungkin karena informasi atau pendataannya yang tidak baik. Laporan tidak teliti atau birokrasi yang berbelit-belit sehingga data ini tidak sampai ke pusat. Sesungguhnya untuk menyelesaikan masalah sekolah yang rusak ada mekanismenya. Namun seluruh dinas pendidikan di tingkat kabupaten aatu kota dan inspektorat jenderal dik das untuk sekolah dasar dan



Komisi X DPR saat mengunjungi sekolah-sekolah di Medan yang dalam kondisi memprihatinkan.

dik men untuk SMP dan SMU/SMK.

Kondisi seperti seharusnya tidak terjadi jika ada koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan di tangan Koabupaten atau kota dan dinas Pendidikan tingkat Provinsi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk sekolah yang sudah tidak dapat memadai untuk menampung siswa, Pemerintah daerah harus memikirkan untuk melakukan perluasan sekolah, namun jika dirasa tidak memungkinkan karena pada daerah padat penduduk dan dirasa harga tidak terjangkau maka pemerintah daerah dapat memikirkan untuk memindahkan sekolah di tempat yang lebih luas

Dia mengharapkan penataan sarana dan prasarana juga harus direncanakan dengan baik agar tidak menjadi persoalan. Serta pemanfaatan laboratorium

praktek seperti laboratorium fisika, kimia, maupun biologi dapat dimanfaatkan dengan baik dengan maksimal, sehingga mutu pendidikan yang berkaitan dengan praktek kurang dipahami siswa. Rully tidak menginginkan terjadi lagi seperti yang ditemukannya seperti peralatan laboratorium yang tidak terawat dan berdebu seperti tidak pernah tersentuh.

Selain itu, Rully juga mendesak agar sekolah-sekolah negeri harus jelas kepemilikan atas tanah. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan harus melakukan pendataan terhadap seluruh sekolah yang ada. "Status kepemilikan tanah sekolah harus bersertifikat, agar tidak terjadi sengketa dan permasalahan di kemudian hari," katanya. (as) foto: parle

Redam Konflik Kepentingan dengan Kenegarawanana

Dinamika politik Indonesia pada tahun 2012 baik di dalam maupun di luar parlemen diperkirakan akan semakin ramai. Partai politik atau kelompok tertentu sah-sah saja memperjuangkan kepentingannya, namun hendaknya negara dan bangsa harus menjadi prioritas utama.

Semua berharap prospek politik 2012 tetap terjaga stabilitasnya, meskipun dinamikanya semakin ramai seiring dengan mengemukanya berbagai kepentingan politik, baik partai-partai politik maupun kelompok-kelompok kepentingan di dalam atau diluar parlemen,"kata Ketua DPR RI Marzuki Alie kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12).

Baginya beragam kepentingan yang muncul dapat diredam apabila segenap pihak termasuk anggota DPR dapat mengedepankan berfikir dan bersikap kenegarawanana, mementingkan rakyat dalam setiap mengambil keputusan.

Pada bagian lain politisi Partai Demokrat ini menambahkan sepanjang tahun 2012 nanti proses hukum terhadap beberapa politisi yang tersangkut kasus korupsi akan berlanjut. Ia meminta aparat penegak hukum tidak ragu bekerja sesuai rambu aturan perundang-undangan yang berlaku. Baginya apapun vonis pengadilan diharapkan tidak berimbas pada menurunnya citra partai politik.

DPR menurutnya akan terus memberikan perhatian terkait kasus kekerasan berdarah yang terjadi di kecamatan Mesuji, Lampung

dan Sumatra selatan, sertadi Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Penyelesaian hukum baik terkait perkebunan, sengketa pertanahan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum oleh aparat akan terus dipantau oleh komisi terkait yaitu Komisi II,III, dan IV.

Ketika ditanya wartawan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian, ia meminta segenap pihak bersabar menunggu hasil investigasi. "Saya tidak dapat berspekulasi memberikan pendapat membenarkan atau menyalahkan pihak manapun, harus dilakukan investigasi untuk mengetahui kebenaran dari segala pihak,"

himbauanya.Ia juga meminta pemerintah segera menyelidiki laporan kasus penghilangan hak atas tanah milik warga.

Ketua DPR Marzuki Alie berharap tahun 2012 ada peningkatan kinerja kearah yang lebih baikdari semua lembaga negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kondisi itu tegasnya akan dapat mendukung terciptanya kondisi keamanan dan dinamika demokrasi yang semakin baik.

Anggota DPR menurutnya akan mengakhiri Masa Reses Persidangan II pada minggu pertama Januari 2012 nanti. Selanjutnya memasuki Masa Persidangan III 2011-2012 pada tanggal 9 Januari 2012. "Kita akan tetap fokus menjalankan tiga fungsi utama kita, yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran," demikian Marzuki. (iky)



Ketua DPR RI Marzuki Alie

Komisi I DPR Soroti Soal Perumahan Dinas TNI di Banjarmasin

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti persoalan perumahan dinas TNI yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pasalnya, perumahan dinas TNI yang berada di Provinsi Kalsel sudah tidak layak huni bagi prajurit, dan selama 20 tahun kondisinya tidak mengalami perubahan.

“Komisi I DPR komitmen akan perjuangkan anggaran untuk kesejahteraan prajurit TNI, khususnya masalah kesehatan dan perumahan dinas TNI di seluruh wilayah Indonesia dengan menyisihkan anggaran dari APBN-P tahun 2012,” kata Tubagus saat ditemui tim Parle usai meninjau Asrama PHB RT.45/46 Banjarmasin, Kalsel, Rabu (21/12).

Menurutnya, perumahan dinas TNI yang sudah 20 tahun ini harus ada perubahan. “Masa perumahan dinasnya begitu-begitu saja, kasihan ‘kan melihat perumahan dinas TNI seperti ini,” tuturnya dengan nada iba.

Yang jelas, lanjut Tubagus, Komisi I DPR sepakat tahun 2012 akan menyisihkan anggaran dari APBN-P untuk segera diproyeksikan. Anggaran ini nantinya akan kita bagikan keseluruhan wilayah Indonesia, jadi bukan hanya di Banjarmasin, Kalsel saja, himbuhnya.

Senada dengan anggota lainnya, Guntur Sasono (F-PD) mengatakan, memang betul keadaan sekarang ini perumahan dinas TNI tidak ada perubahan sama sekali. “Nampaknya masalah perumahan dinas TNI ini tidak terlalu menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan pembangunan dari atas belum terpikirkan, ini yang harus kita utamakan, terutama yang kita lihat secara langsung perumahan dinas TNI masih sangat jauh daripada layak pakai, begitu juga dengan kendaraan dinas yang diberikan tidak layak pakai, tambahannya.

Menurut Guntur, masalah biaya pemeliharaan perumahan dinas dan pembangunan rumah dinas TNI ini harus menjadi prioritas disamping alut-



Tim Kunker Komisi I DPR saat mengunjungi perumahan dinas TNI di Banjarmasin, Kalsel

sista. Begitu juga dengan kendaraan dinas dan kesejahteraan prajurit. “Ini harus mendapatkan suatu perhatian dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Dia menambahkan, seorang prajurit bisa hidup tenang dengan keluarganya kalau kesejahteraannya prima. Begitu juga dengan perumahan dinas yang atap rumahnya sirap apabila hujan banyak yang bocor, apabila laut sedang pasang airnya naik ke rumah-rumah dinas TNI bahkan banyak ular yang naik ke dalam rumah dinas kalau laut sedang pasang. “Ini ‘kan sangat menyedihkan, saya ini kebetulan pernah tinggal disini dari tahun 1971 sampai tahun 1983, jadi saya tahu persis keadaan perumahan dinas ini yang kita lihat sekarang ini tidak ada perubahan sama sekali,” tambahnya.

Dia mengharapkan, Komisi I DPR setiap melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah memiliki nilai tambah, dan tidak hanya mengutarakan janji-janji belaka, “Memang tidak mudah, karena pada dasarnya kita kunjungan ke suatu daerah merupakan bagian



perumahan dinas TNI yang tak layak huni

daripada seluruh general di dalam satu kesatuan ini. Kalau nanti kita mensikapi satu daerah tidak sama dengan daerah yang lain, padahal kalau tahu institusi TNI itu harusnya menyeluruh sama. Ini bagian daripada bagian yang besar, dan TNI adalah kuat sekali. Ini akan kita coba dan perlu kita pikirkan bagaimana keberpihakan yang sepihak tidak mengganggu sistem secara keseluruhan,” katanya.(iw)/foto:iw/parle.

Pemprov Banten Diminta Segera Atasi Masalah Pengangguran

Angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Propinsi Banten hingga saat ini masih cukup tinggi yakni mencapai 680.564 orang, maka hal seperti ini Pemprov segera mengatasi secara serius.

Demikian yang dikatakan Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR ke Propinsi Banten Jawa Barat, Achmad Nizar Shihab pada saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Propinsi Banten HM. Masduki di Pendopo Gubernur Banten, Jawa barat, Senin (19/12) siang.

Nizar Shihab menyarankan, sebaiknya Pemprov Banten dan Kabupaten/ Kota di Banten lebih banyak mendirikan SMK serta mengefektifkan Balai latihan kerja (BLK) untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Kami harap pemerintah propinsi, Kabupaten dan Kota serius menangani masalah pengangguran ini, ujar Nizar.

Ketua rombongan tim Kunjungan Komisi IX DPR Achmad Nizar Shihab menambahkan, pemprov mestinya sudah mengantisipasi masalah ini secara serius, keseriusan Pemprov melalui langkah-langkah dan program-program strategis sangat dibutuhkan untuk penanganannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Selain itu Pemprov Banten juga harus lebih gencar mendatangkan para investor untuk menanamkan modalnya di Banten, serta meminta pihak perusahaan lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Upaya lain bisa dilakukan dengan cara mengefektifkan BLK yang ada menambah instruktur yang lebih kompeten di bidangnya serta disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja didaerah masing-masing, kata Nizar.

Anggota Komisi IX DPR yang lain Zuber Syafawi meminta agar Pemprov Banten lebih memperbanyak sekolah kejuruan atau SMK, sehingga bisa menghasilkan lulusan sekolah yang memiliki keahlian tertentu dan siap memasuki dunia kerja, saran kami untuk mengatasi pengangguran jangka panjang, Banten harus memperbanyak sekolah kejuaruan yang lulusannya lebih siap masuk dunia kerja maupun berwirausaha, kata Zuber.

Sementara Anggota Komisi IX DPR

yang lain Rudianto Tjen mengingatkan Pemprov Banten agar siap mengantisipasi dampak dari krisis keuangan dunia terhadap industri, mengingat Banten merupakan daerah industri sehingga tidak terjadi PHK, saya kira dampak krisis ini belum terasa saat ini, tetapi Banten harus mengantisipasi jangan sampai terjadi PHK yang akan menambah pengangguran seperti saat ini, ujar Rudianto Tjen.

Wakil Gubernur Propinsi Banten HM. Masduki dalam kesempatan itu mengatakan, dalam upaya mengatasi masalah pengangguran tersebut, Pemprov Banten terus berupaya mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Banten sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Selain itu, upaya yang dilakukannya juga melakukan bursa kerja, untuk memberikan pelatihan di BLK, serta terus meningkatkan jumlah sekolah kejuruan untuk mencetak lulusan yang siap kerja maupun membuka usaha lapangan kerja sendiri, salah satu bukti upaya yang kami lakukan saat ini adalah adanya perusahaan pabrik baja Krakatau-Posco yang akan menyerap ribuan tenaga kerja, jelas Masduki.

Dikatakan juga, bahwa peran penting dari BLK sangat membantu mengurangi angka pengangguran, walaupun diakuinya saat ini masih banyak kendala-kendala termasuk kurangnya ketersediaan anggaran yang mencukupi. Soal kesehatan, Masduki menuturkan ada empat sasaran MDGS yang terus diupayakan pemerintah Banten menyangkut kesehatan meliputi bidang kesehatan, angka kematian balita, penekanan kematian ibu dan anak serta penanganan masalah HIV. Kata Masduki.

Menurut Masduki program-program yang diluncurkan pemerintah pusat melalui kementerian sangat dibutuhkan di Banten karena sangat



Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR ke Provinsi Banten Jawa Barat, Achmad Nizar Shihab

membantudan menolong bagi masyarakat Banten. Tetapi pelaksanaan program-program yang ada membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya dari para aparaturnya seperti pengelola posyandu.

Keberadaan Pos Yandu dengan kader-kadernya perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, oleh karena itu kami sangat senang jika pemerintah pusat bisa memperbanyak (menambah) tenaga bidan desa terkait dengan program-program

ke depan, tambah masduki.

Perlu diketahui bahwa kunjungan kerja Komisi IX DPR yang diikuti oleh 19 orang anggota ke Propinsi Banten yang dipimpin oleh Achmad Nizar Shihab akan berlangsung selama 5 hari, setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Banten, Komisi IX DPR juga akan melakukan kunjungan peninjauan ke beberapa Rumah Sakit di Banten seperti RSUD Serang, RSUD Pandeglang, RSUD Adjidarmo Rangkasbitung Lebak, dan BLK Serang.

Rombongan juga akan melakukan pertemuan-pertemuan lain dengan Bupati-Bupati dan Walikota Banten seperti Walikota Cilegon Tb Imam Ariyadi, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya dan jajaran terkait lainnya, tujuan kunjungan Komisi IX DPR tersebut adalah dalam rangka menyerap aspirasi tentang program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), serta ketenagaakerjaan dan transmigrasi yang ada di daerah Banten. (Spy) foto:sp/parle

RUU Pemilukada Pertimbangkan Terjadi Pecah Kongsi

Kasus terjadi pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya harus menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan dan Pemerintah pada saat pembahasan RUU Pemilukada.

"Kepala daerah dan wakilnya, tidak dapat bersama melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya. Kasus terakhir terjadi di Provinsi DKI Jakarta," jelas Ketua DPR RI Marzuki Alie, dalam Pidato Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012, Senin (9/1) di Gedung DPR, Jakarta.

Dengan pembahasan ini, diharapkan ditemukan perbaikan sistem Pemilukada yang baik dan mampu memberikan solusi. Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilukada dimaksudkan, untuk menempatkan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis di dalam konstruksi sistem Pemerintahan NKRI, memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, mereduksi konflik di daerah, serta meminimalisir aspek psiko-politik masyarakat di daerah. "Di dalam UU Pemilukada yang diharapkan lebih komprehensif ini, perlu pengaturan tentang pemilihan langsung Wakil Kepala Daerah dalam satu paket," Kata Marzuki Alie.

Dari laporan Bawaslu, selama ta-

Ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilukada sudah sering nampak di permukaan.



Jajaran Pimpinan DPR saat Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012

hun 2011, setidaknya telah terjadi 1718 pelanggaran, 33% merupakan pelanggaran administrasi, 22% atau sebesar 372 kasus adalah pelanggaran pidana. Sisanya tidak ditangani lebih lanjut karena kurang cukup bukti atau kadaluarsa. Sangat disayangkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan politik uang, PNS yang tidak netral, dan lain-lain. Pelanggaran tersebut tidak dapat ditolerir, walaupun kita mengetahui

bahwa sistem Pemilukada Langsung baru saja diterapkan.

Selanjutnya Ketua DPR RI mengharapkan, Komisi II DPR atau sekurang-kurangnya Panitia Kerja Mafia Pemilu dapat menjadikan laporan Bawaslu ini bahan evaluasi. Tidak hanya bagi masukan RUU Pemilukada yang akan dibahas, tetapi juga dimaksudkan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. (as)/foto:iw/parle.

Bali Harus Segera Pikirkan Atasi Kemacetan

Beberapa media lokal di Bali sering menuliskan masalah kemacetan yang cukup serius yang dikhawatirkan akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Masalah kemacetan di provinsi ini harus segera dicarikan pemecahannya, sebab jika tidak akan menjadi ancaman yang serius bagi kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.



Anggota Komisi X DPR Jefirstson R. Riwu saat Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Provinsi Bali

Demikian disampaikan Jefirstson R. Riwu Kore disela-sela kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Bali, Selasa (20/12).

Jefri mengatakan, fenomena kemacetan di Bali tak ubahnya seperti kemacetan yang terjadi di Jakarta. Apalagi saat libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru di titik-tik tertentu kemacetan ini menjadi pemandangan yang sudah biasa disaksikan sehari-hari.

Masalah kemacetan ini menjadi tidak nyaman bagi pengunjung yang akan berlibur di Bali. Untuk itu, harus ada program khusus dari Pemerintah Bali termasuk Pemerintah Pusat bagaimana mengatasi kemacetan di Pulau Dewata ini. Karena kalau tidak segera diatasi jangan mengharapkan target pariwisata dengan kunjungan wisatawan yang banyak dapat tercapai. "Jangankan wisatawan mancanegara, wisatawan lokal saja jika kondisinya kemacetannya semakin parah banyak yang tidak mau," kata Jefri.

Tentunya hal ini perlu didiskusikan jalan keluarnya dengan pemangku

adat disini karena bagaimanapun penataan infrastruktur ini tidak terlepas dari budaya yang ada, budaya yang ada harus disinkronkan dengan penataan infrastruktur.

Jika nantinya akan ada pembangunan subway atau jalan dari bawah, perlu dipikirkan apakah itu melanggar tata aturan adat, nilai-nilai adat. : Semua itu harus dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah dan harus ada program cepat untuk mengatasi hal ini," katanya.

Terus terang Jefri mengatakan dia tidak tahu masterplant Bali, namun jika kondisinya seperti ini harus dirubah secara keseluruhan. Tentunya hal ini akan melibatkan lintas sektor, bidang infrastruktur dan pariwisata perlu duduk bersama memecahkan hal ini.

Action cepat ini perlu dilakukan mengingat dalam waktu dua atau tiga tahun kemacetan itu akan semakin bertambah. Padahal membangun infrastruktur jalan memerlukan waktu yang cukup lama.

Jefri menekankan perlunya dianali-

sa kembali masalah master plant infrastruktur yang ada di Bali. Tentunya perlu dipikirkan dibuat untuk 20 tahun mendatang.

Menurut Jefri, masalah kemacetan ini juga menjadi ancaman serius bagi pendapatan devisa Indonesia, termasuk didalamnya pariwisata sebagai bagian integral dari penghasilan Indonesia dimana juga tidak terlepas dari pada multiplier efek terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Tentunya perlu dipikirkan, dengan matinya pariwisata banyak sekali yang akan macet, mulai jasa travelnya, hotel-hotel, restaurant, pedagang souvenir dan lain-lain.

Jefri mengatakan, masalah kemacetan di daerah ini juga akan disampaikan Komisi X DPR saat rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Jika dilihat faktor-faktor lainnya, rasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bali memiliki SDM pariwisata yang cukup handal, akomodasi yang luar biasa banyaknya dan ditunjang bandar udara kelas internasional.

Namun dia mengingatkan jangan hanya mengembangkan destinasi-destinasi tapi tidak memperhatikan infrastruktur jalan, transportasi yang menjadi hal terpenting dalam kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. "Tanpa penanganan serius menyebabkan orang gerah datang ke sini," tambah Jefri.

Menurut Jefri, Bali juga sudah saatnya mengembangkan daerah-daerah wisata lainnya selain Kuta, Sanur dan Denpasar yang menjadi sentra kemacetan. Seperti pengembangan pariwisata di Gianyar dengan adanya Bali Safari dan Marine Park ini juga salah satu terobosan penyebaran wisatawan ke berbagai daerah di Bali. (tt) foto:tt/parle

Santri Harus Berfikir untuk Menjadi Orang Kaya

Pondok Pesantren (Ponpes) diminta membekali para santri-nya untuk siap menjadi pengusaha yang kaya agar pada saatnya dapat menjadi orang yang banyak memberi bukan meminta-minta. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk berupaya menjadi orang kaya, tidak pernah mengajarkan umatnya menjadi orang miskin.

“Salah besar kalau pendidikan pesantren itu mengarahkan menjadi miskin. Saya keliling pesantren untuk menjelaskan ini. Rasul kita itu tidak miskin kok, dia pengusaha yang kaya karena mampu menyediakan mahar 40 unta saat menikah dengan Khadijah. Walaupun pengusaha kaya namun yang paling penting Nabi hidupnya sederhana, beliau kaya untuk memberi,” jelas Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan ceramah di Ponpes Gading Mangu, Jombang, Jawa Timur, Senin (26/12/11)

baga keuangan mikro di Bali yang bisnisnya bisa mencapai triliunan rupiah. Ini menurutnya bisa mensejahterakan satu desa, sekaligus membangun dan menjaga budayanya.

“Saya juga pernah mencoba memberdayakan ekonomi satu panti asuhan di Palembang dan berhasil. Warga panti diajarkan membuka toko sederhana, dilatih keterampilan menjahit, memasarkan. Akhirnya mereka mandiri kalau sebelumnya rutin datang meminta bantuan, setelah itu tidak pernah lagi,” paparnya. Baginya kalau bangsa ini

penting sudah saya sampaikan.”

Politisi Partai Demokrat ini memotivasi santri untuk mulai dari sekarang berfikir bagaimana menjadi kaya dengan cara yang halal. Tuhan katanya sudah menunjukkan ini jalan yang baik dan itu tidak baik. “Menjadi kaya supaya bermanfaat, supaya bisa membantu umat yang lain. Berfikirlah jadi orang kaya, bagaimana caranya belajarlah dari sekarang, berfikir kedepan mau jadi apa, rencanakan dari sekarang. Dengan niat, usaha keras, keyakinan, doa dan tawakal insyaAllah tercapai,”



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan ceramah di Ponpes Gading Mangu, Jombang, Jawa Timur

Orientasi pendidikan di pesantren jangan hanya mengarahkan santri untuk bisa berceramah saja, tapi perlu berikhtiar membangun ekonomi umat berbasis komunitas dan potensi di masyarakat. Sebagai perbandingan ia mengaku pernah meninjau satu lem-

berkomitmen membangun dan menjaga konsistensi, urusan negara tidak ada sulitnya. “Saya sudah sampaikan kepada Wapres bagaimana membangun ekonomi berdasarkan komunitas sesuai potensi yang mereka miliki. Saya tidak tahu apa sudah berjalan, yang

demikian Marzuki.

Dalam kesempatan itu Ketua DPR meresmikan gedung baru TK dan SMP Ponpes Gading Mangu. Pimpinan pesantren Nurhadi menjelaskan komplek pendidikan yang berdiri berdiri di desa Perak sejak tahun 1952 terus

berkembang. Saat ini telah memiliki 95 ustadz/guru dan 3960 santri, 1598 diantaranya tinggal di pondok. Ia juga menyebut sedang menuntaskan pembangunan Masjid Luhur Nurhasan yang menurutnya salah satu mesjid terbesar untuk tingkat desa di seluruh Indonesia.

Inspiratif atau Indoktrinatif

Sementara itu pada saat berdialog dengan pimpinan dan staf pengajar Ponpes Wali Barokah, di Kediri, Jatim, Ketua DPR Marzuki Alie mengingatkan pentingnya para guru menjadi sumber inspirasi bagi para muridnya. "Saya merisaukan kondisi sekarang dimana para guru cenderung menjadi indoktrinatif," tandasnya. Ini menurutnya terjadi karena guru tidak fokus mengajar karena harus mencari tambahan di tempat lain untuk menutupi kekurangan penghasilan. Kegiatan belajar mengajar hanya sekedar menjadi kegiatan transfer ilmu.

Baginya indoktrinasi akan membuat murid takut terhadap guru, tidak akan ada penghormatan dan penghargaan pada guru. Pada akhirnya murid akan cenderung cepat melupakan. Sedang guru yang inspiratif adalah guru yang melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan mampu mempengaruhi murid dari hatinya. "Saya punya guru namanya Pak Ridwan, sampai sekarang saya masih ingat mukanya artinya saya

terinspirasi. Dia mempengaruhi fikiran dan perasaan saya sampai sekarang," imbuhnya.

Ketua DPR berkesempatan meninjau fasilitas perpustakaan pondok yang cukup representatif. Namun ia terlihat tertegun ketika mendapat penjelasan seluruh koleksi buku di perpustakaan tersebut adalah buku-buku agama. Ia meminta agar pimpinan ponpes membuka cakrawala para santri dengan menyediakan buku disiplin ilmu lain. "Ada 700 koleksi kitab agama tapi buku pengetahuan umum tidak ada. Santri perlu mengetahui perkembangan ilmu lain, agar pemahaman mereka lebih lengkap," kata Marzuki. (iky/foto:lg)

"Pendidikan Karakter Bisa Cegah Korupsi"

Pendidikan karakter merupakan salah satu modal dalam menangkal tindak pidana korupsi, dan dalam fungsi itulah guru memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa di masa datang.

Hal ini diungkapkan Ketua DPR-RI Marzuki Alie dalam rangkaian seminar nasional pendidikan yang diselenggarakan oleh PGRI Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Solo, Klaten, Ungaran dan IKIP PGRI Semarang, 3-6 Januari 2012.

Menurutnya, adanya mekanisme check and balance di masyarakat belum menjadi pengontrol, tetapi malah korupsi semakin besar. Karena itu, peran pendidikan karakter dan akidah sangat penting. Sebab, jika pendidikan hanya mengejar hapalan saja tanpa mengindahkan pendidikan karakter, akan mencetak manusia yang tidak memahami tujuan ilmu pengetahuan. Tanpa pendidikan karakter yang baik, anggaran pemerintah akan sia-sia.

Dihadapan 4.500 anggota PGRI di Karanganyar, (3/1), Ketua DPR menyampaikan perlunya efektifitas anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan sebesar ratusan triliun rupiah yang disalurkan ke-20 kementerian kurang mendukung terciptanya kualitas guru dan pembentukan karakter anak-anak bangsa. Ia menyebutkan, 20 kementerian mendapatkan bagian dari anggaran pendidikan dari APBN 2012 sebesar Rp 288,957 triliun atau sekitar 20% dari APBN 2012. Namun, ia khawatir dana itu tidak pernah memberikan dampak maksimal terhadap hasil pendidikan, karena visi dan misi masing-masing kementerian tidak sama. "Cita-cita saya, setiap guru mendapat penghasilan setidaknya Rp. 15 juta se-



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memberi ceramah di Seminar Nasional Pendidikan oleh PGRI Semarang

bulan. Sekarang penghasilan sudah mulai meningkat, guru-guru yang sudah disertifikasi pendapatannya Rp. 4 jutaan sebulan karena mendapatkan tunjangan profesi, yang belum lulus sertifikasi pendapatannya pun tidak kurang dari Rp. 2 juta,” paparnya panjang lebar.

Hal lain yang menjadikan pendidikan mempunyai posisi strategis dalam keberlangsungan berbangsa dan bernegara, lanjut Marzuki, apabila rakyat dan generasi muda mendapat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan yang maksimal dan murah dari negara. “Tiga faktor inilah yang paling vital. Pendidikan generasi muda berkualitas harus dari guru yang berkualitas. Ini yang terus diperjuangkan DPR,” ujarnya.

Pada hari yang sama di PGRI Sragen, Marzuki Alie menyatakan, Pemerintah akan menuntaskan seluruh tenaga honorer kategori I dan II yang ada untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemerintah memang berkomitmen untuk mengangkat secara bertahap seluruh honorer yang masuk database pendataan tahun 2005, baik yang kategori I dan II. Namun demikian, proses penuntasan tenaga honorer khususnya untuk guru, memang sedikit menemui kendala. Dimana, masih ditemui database guru yang terkadang belum mencerminkan fakta yang sesungguhnya. “Mestinya semua guru yang bertugas di sekolah negeri itu harus PNS. Cuma persoalannya, kadang pas ada yang pensiun diangkat guru honor lagi. Sehingga kadang ada sekolah yang mestinya kekurangan guru tidak cepat diketahui karena sudah ditutup pakai guru honor itu,” terang Marzuki.

Persoalan pendataan kondisi riil guru inilah yang menurutnya harus diperbaiki. Di sisi lain, juga disampaikan bahwa pemerintah juga akan mengevaluasi pemberian anggaran sertifikasi untuk para guru. Hal ini dikarenakan adanya fakta dan fenomena bahwa pemberian tunjangan tersebut belum mampu meningkatkan kinerja guru seperti yang diharapkan. “Idealnya kalau kesejahteraannya naik otomatis juga dibarengi dengan kinerja yang meningkat. Tapi kadang karena penghasilannya semakin besar, guru malah lebih banyak ke mall, sehingga

lupa akan tugasnya. Maka dari itu, tunjangan sertifikasi memang harus dievaluasi,” tegasnya.

Di Sragen, selain acara PGRI, Ketua DPR juga mengunjungi korban banjir dan DPD Perunggu Kabupaten Sragen.

Sementara di PGRI Sukoharjo, (4/1), Ketua DPR menyampaikan agar Pemerintah memperhatikan guru swasta dan honorer. Minimnya pendapatan yang diterima oleh para guru honorer, baik di sekolah negeri terlebih lagi swasta, membuatnya prihatin. Ia meminta PGRI berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. “Awalnya saya tidak respek dengan keberadaan PGRI karena hanya memperhatikan guru PNS sedangkan yang swasta belum. Terlebih lagi guru honorer yang juga menjadi bagian justru nasibnya sangat memprihatinkan. Namun semua pandangan itu berubah setelah PGRI ternyata ikut memikirkan, jadi sudah sepantasnya DPR-RI membantu memperjuangkan perbaikan tingkat kesejahteraan bagi guru honorer di sekolah negeri maupun swasta. PGRI sudah menyampaikan mengenai masalah upah minimal ini. Ini penting untuk diperjuangkan,” jelas Marzuki Alie.

Di PGRI Solo, (4/1), Ketua DPR mengomentari tentang kinerja aparat penegak hukum. Ia berharap aparat penegak hukum mengedepankan hati nurani dalam menangani kasus, terutama yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Ketua DPR menyampaikan hal tersebut ketika menanggapi banyaknya kasus tidak masuk akal yang ditangani penegak hukum, seperti pencurian sandal oleh AAL, remaja berusia 15 tahun, di Palu, Sulawesi Tengah.

Selain itu, Ketua DPR juga mengkritik sikap para guru yang hanya melaksanakan tanggungjawab sebagai guru, namun kurang amanah. Guru mestinya bisa menjadi sosok yang mencerdaskan dan membangun karakter generasi muda, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban mengajar. Sebagai seorang sosok panutan yang patut digugu dan ditiru, seorang guru tidak boleh melupakan amanah untuk membentuk karakter bangsa. Kalau itu tidak dijalankan, dampaknya seperti yang disaksikan bersama saat

ini. Tawuran antarpelajar, mahasiswa merusak kampus, murid memukul guru, dan guru menyiksa murid.

Di Solo ini juga, Ketua DPR sempat melihat dan memesan satu mobil Kiat Esemka Digdaya double cabin sebelum seminar. Dalam kesempatan itu ia melihat mobil Kiat Esemka plat merah Nopol AD 1 A yang digunakan Walikota Solo, Joko Widodo. Ia mengatakan, kreativitas karya anak bangsa harus didukung. Bila ada investor yang mau memberikan modal untuk komersialisasi Kiat Esemka, sangat didukung. Pasalnya Indonesia belum mempunyai mobil nasional (Mobnas). Perihal belum adanya izin jalan, ia Marzuki meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan bertindak pro aktif memfasilitasi pengurusan izin.

Sementara di PGRI Klaten, (5/1), ketua DPR kembali menekankan pendidikan karakter sebagai modal dalam menangkal tindak pidana korupsi. Dalam fungsi itulah guru memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa di masa datang. Hal ini juga disampaikannya pada seminar di Ungaran dan Kuliah Umum di IKIP PGRI Semarang, (6/1), dengan tema Kebijakan Pendidikan dalam Menyiapkan Generasi Muda Menuju Visi Indonesia 2025-2045.

Sementara itu, Ketua Umum PGRI Dr. Sulistyono yang menyertai Ketua DPR dalam seminar di Jawa Tengah ini, menyampaikan bahwa persoalan bangsa ini hanya bisa diselesaikan dengan pendidikan. “Sebuah penelitian menyimpulkan 80% orang sukses itu karena karakter, bukan pendidikan,” ungkapnya.

Selain itu, Sulistyono menilai pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah 2011 sebagai program BOS terburuk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, PGRI sudah mendesak pemerintah pusat untuk mengubah mekanisme pencairan BOS pada 2012. “Usulan kami akhirnya diterima. Pada 2012 mekanisme pencairan BOS dikembalikan ke mekanisme lama. BOS akan dicairkan langsung ke rekening sekolah. Kami jamin, paling lambat tanggal 10 Januari, BOS sudah masuk rekening sekolah,” tutur Sulistyono.* (Pemdprri) foto:ig/parle

Komisi III Tinjau Lapas Kelas I Semarang

Komisi III DPR RI, komisi dewan yang membidangi hukum dan peradilan, pada reses persidangan kali ini mengunjungi provinsi Jawa Tengah.



Komisi III DPR saat meninjau Lapas kelas 1 di Semarang

Setelah melakukan pertemuan dengan gubernur Bibit Waluyo dan jajaran SKPD provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Tengah, Tim bergerak menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang yang terletak di Jl. Raya Semarang – Boja Km. 4.

Usai peninjauan Ketua Tim Komisi III, Tjatur Sapto Edi (F-PAN) mengatakan, provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang berpenduduk besar dengan 36 kabupaten/kota, tentunya mempunyai persoalan hukum yang juga besar.

Tjatur mengungkapkan, berdasarkan keterangan Kalapas, Lapas Kelas I ini sudah melebihi kapasitasnya. “Lapas ini sudah over capacity hampir 100%, kapasitasnya hanya 530 tetapi dihuni oleh 978 orang narapidana,” kata Tjatur.

Wakil Ketua Komisi III ini menyatakan, temuan ini menjadi perhatian Komisi III untuk segera dicari jalan keluarnya. Selain itu di blok khusus narkoba, narapidana dengan vonis pengedar dan pemakai disatukan. “Ini kan berbahaya, bisa-bisa mereka malah bekerjasama,” kata Tjatur. “Kita harus hindari itu,” tegasnya.

Kalapas Kelas I Semarang, Nyoman Putra Surya kepada Tim Komisi III menjelaskan, memang ada napi pengguna narkoba yang disatukan dengan napi produsen narkoba, hal ini dilakukan karena ruang yang terbatas. “Pengedarnya masih disatukan karena hukumannya pendek-pendek,” jelas Kalapas memberi alasan. Nyoman Putra menambahkan, dalam pengeledahan pengunjung petugas sering menemukan narkoba yang dimasukkan ke dalam roti, botol minuman, maupun botol kosmetik.

Dalam peninjauan tersebut, Tim Komisi III juga sempat berdialog dengan para narapidana kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), beberapa orang diantaranya merupakan mantan kepala daerah di Jawa Tengah. Kepada Komisi III, para napi tipikor mengeluhkan tuduhan merugikan keuangan negara yang dikenakan terhadap mereka. Tjatur Sapto Edi mengatakan, hingga saat ini lembaga yang berhak menentukan mengenai kerugian negara masih simpang siur. “Apakah kemenkeu, BPKP, BPK, atau penyidik yang berwenang menentukan soal kerugian negara,” ucap Tjatur. “Persoalan ini tentu akan menjadi masukan bagi revisi RUU Tipikor,” tambahnya.

Saat ditanya wartawan mengapa banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, Tjatur mengatakan, korupsi terjadi karena ada niat dan kesempatan, juga terkait soal pelaksanaan anggaran maupun tekanan sistem politik. Menurut keterangan para terpidana, banyak kasus yang sebenarnya tidak mereka lakukan, tetapi ditarik menjadi kasus yang melibatkan mereka dengan berbagai macam asumsi. “Saat ini DPR sedang melakukan revisi terhadap UU tentang pemerintahan daerah, UU Pilkada dan UU Tipikor, tentunya temuan ini akan menjadi masukan yang berharga untuk perbaikan UU,” ujar Tjatur menjelaskan.

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menjelaskan, ada lima kejahatan yang dikategorikan berat yaitu terorisme, korupsi, narkoba, kejahatan trans nasional, dan perbuatan melawan negara. Tjatur mengatakan anggota Komisi III sepakat untuk dilakukan moratorium remisi, pemberatan, atau apapun istilahnya, tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai aturan perundangan. “Kita tidak bisa menerapkan aturan dengan cara melanggar undang-undang,” tegas Tjatur. (Roy. Tvp)

DPR Minta TVRI Banjarmasin Tingkatkan Efisiensi dan Efektivitasnya

Komisi I DPR RI meminta kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP), baik RRI maupun TVRI dapat meningkatkan efisiensinya dan efektivitasnya melalui Undang-Undang tentang Penyiaran yang baru. Pasalnya, banyak lembaga broadcasting public ternama didunia baik Televisi maupun Radio menjadi satu atap.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR, Hayono Isman saat pertemuan dengan Kepala Station RRI, TVRI, Ketua KPID dan PT. Pos dalam rangka kunjungan kerja Komisi I DPR ke Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (20/12). “BBC, ABC, NHK di Jepang itu radio dan televisi-nya satu atap. Kalau di Indonesia belum satu atap,” tuturnya.

Hayono mengakui bahwa LPP kita ini belum efisien bahkan kemas programnya pun masih tertinggal dibandingkan dengan swasta. Jadi dalam semangat ini kita mengharapkan RRI maupun TVRI di Banjarmasin mulai berpikir langkah-langkah efisien. “Ini sangat penting untuk moralitas dan pendidikan bangsa yang baik dan berkualitas sehingga bangsa kita sekali waktu bisa menjadi bangsa yang besar,” tegasnya.

Hayono berharap RRI dan TVRI tetap bersama-sama dibawah satu kelembagaan, yang sementara Komisi I DPR sebut Radio Televisi Indonesia (RTI).

Menyoroti masalah Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Kalsel yang tidak setuju dengan dibuatnya struktural, Haryono menjelaskan struktural boleh tapi rekrutmentnya daripada anggota KPID tetap melalui DPRD sehingga ada keterkaitan antara KPID dengan daerahnya. “Kalau KPID daerah yang lain yang saya tangkap mereka setuju struktural,” kata Hayono.

Dia menambahkan, kelihatannya ada perbedaan pendapat antara KPID Kalsel dengan KPID daerah yang lain, saya baru tahu sekarang KPID Kalsel tidak setuju

ju dengan struktural, himbuhnya.

Senada dengan anggota lainnya, Effendy Choirie (F-PKB) mengatakan, prihatin TVRI dan RRI terus menerus menggunakan uang negara tetapi tampilannya masih seperti ini dan manfaatnya tidak terlalu besar buat rakyat. “Kita ingin memiliki LPP yang punya sejarah ini bukan terus menerus bernostalgia, bukan terus menerus menjadi beban negara tetapi LPP yang sanggup menatap dan melayani perkembangan zaman,” jelasnya.

Menurutnya, memang beda sekali jika dibandingkan dengan swasta yang mempunyai kelembagaannya yang bagus, SDMnya pun bagus, jaringannya

luas dapat melayani seluruh wilayah Indonesia meskipun kita batas. “Itu harus kita sadari bahwa TVRI maupun RRI belum sebagus swasta, terutama TVRI,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, kelembagaan harus diubah, SDM dan alat-alatnya harus diperbaiki, begitu juga dengan budayanya bukan kultur PNS, bukan kultur politik tetapi budayanya harus kultur profesional, budayanya broadcast. “Jadi kalau ada ide-ide dari siapapun yang sifatnya untuk memperbaiki TVRI dan RRI, saya kira TVRI dan RRI harus proaktif,” paparnya. (iw)/foto :iw/parle.



Wakil Ketua Komisi I DPR, Hayono Isman saat pertemuan dengan Kepala Station RRI, TVRI, Ketua KPID dan PT. Pos dalam rangka kunjungan kerja Komisi I DPR ke Provinsi Kalimantan Selatan

DPR RI tetapkan 64 RUU Prioritas Tahun 2012

Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012 telah dibuka ditandai dengan Pidato Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (9/1) di Gedung DPR RI Jakarta.



Jajaran Pimpinan DPR saat Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012

Berkaitan dengan fungsi legislasi, untuk tahun 2012, DPR dan Pemerintah telah menetapkan 64 RUU sebagai prioritas tahunan, termasuk 16 (enam belas) RUU yang telah memasuki pembicaraan Tingkat I, 8 (delapan) diantaranya telah mengalami perpanjangan masa tugas 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.

RUU tersebut antara lain, RUU tentang Keamanan Nasional, RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang Pendidikan Tinggi, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, dan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

Tahun lalu, DPR bersama Pemerintah telah menetapkan 91 (sembilan puluh satu) RUU sebagai prioritas, diselesaikan 25 (dua puluh lima) RUU, termasuk 5 RUU kumulatif terbuka.

RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) misalnya, pembentukan BPJS-1 yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan,

dan BPJS-2 yang mengelola jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun, telah disahkan melalui proses yang sangat panjang. Disahkannya RUU BPJS merupakan perjuangan yang cukup berat, sebagai komitmen DPR yang berpihak pada kepentingan rakyat dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

RUU lain yang mengalami dinamika tinggi dan mendapat perhatian serius dalam pembahasannya adalah RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang ini sangat penting, karena dengan adanya OJK, kualitas dan manfaat pengawasan bank akan lebih maksimal. Undang-undang lain yang memiliki arti penting bagi masyarakat Indonesia antara lain, UU tentang Bantuan Hukum, UU tentang Pengelolaan Zakat dan UU tentang Penanganan Fakir Miskin. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa produk UU yang dihasilkan DPR jangan hanya dilihat dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat.

Berkaitan dengan banyaknya RUU prioritas tahun 2012, Pimpinan Dewan kembali mengingatkan kepada seluruh anggota Dewan dan fraksi, untuk memanfaatkan momentum tahun 2012, sebagai tahun legislasi. Badan Musyawarah telah menerima usulan dari Badan Legislasi, agar agenda DPR lebih fokus kepada fungsi legislasi.

Masa Persidangan III 2011-2012 ini, kegiatan Dewan dibagi dalam 2 (dua) kelompok, pertama, kegiatan legislasi sebanyak 60%, dan kedua, kegiatan anggaran dan pengawasan sebesar 40%. Dua kelompok kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian per-minggu termasuk untuk alokasi bagi Rapat Paripurna, Rapat Fraksi, Rapat Badan-Badan, dan Rapat Tim.

Alokasi kegiatan ini akan disesuaikan untuk Masa Persidangan I dan IV dalam membahas anggaran. Pola penjadwalan per-minggu ini memiliki manfaat agar anggota dewan bisa lebih fokus sehingga memungkinkan penyelesaian target RUU lebih cepat, minimalisasi overlapping sidang, administrasi dan penyiapan bahan lebih mudah, serta durasi rapat lebih efektif.

Pimpinan meminta Dewan dapat mempergunakan waktu selama Masa Sidang III ini, untuk dapat menyelesaikan berbagai RUU prioritas, termasuk RUU tentang Pemilu Legislatif. Untuk RUU tentang Pemilu Legislatif, perlu ada target yang jelas mengenai waktu penyelesaiannya.

UU ini sangat penting bagi penyelenggaraan Pemilu 2014 sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Dan untuk menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas, diperlukan waktu yang memadai, di antaranya melakukan sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia terutama yang memiliki hak pilih. (as)/foto:iw/parle.

Keberadaan Bali Safari Harus Dapat Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

Komisi X DPR RI berharap keberadaan Bali Safari dan Marine Park yang belum lama dibangun di Kabupaten Gianyar harus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Demikian disampaikan Ketua Komisi X DPR Mahyuddin saat memimpin Tim Komisi X berkunjung ke tempat wisata tersebut dalam serangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Senin (19/12).

Mahyuddin mengatakan, dibukanya suatu tempat hiburan baru, manfaatnya juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat terutama dari sisi ekonomi. Pihak Bali Safari harus banyak melibatkan masyarakat sekitar, baik dengan merekrut SDM nya atau melibatkan dalam hal-hal lain yang dapat menambah penghasilan mereka.

Mahyuddin menyambut baik pengembangan daerah wisata di Bali yang tidak hanya terpusat pada tempat-tempat yang sudah ramai seperti Sanur, Kuta dan Denpasar. Dan dia berharap pengembangan ini juga dilakukan di kabupaten-kabupaten lain di Bali yang belum banyak dikunjungi wisatawan.

Executive Assistant Manager Bali Safari Mabrio Bradley mengatakan, Bali Safari baru dibuka sekitar dua tahun yang lalu yang berdiri diatas lahan 30 hektar. Dibandingkan dengan Taman Safari di Puncak Bogor atau Jatim Park memang luasnya jauh lebih kecil.

Bali Safari dikelola murni oleh swasta, namun perijinannya menjadi hak sepenuhnya Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Menurut Bradley, Bali Safari ini sangat diminati wisatawan asing. Walaupun lebih kecil dari Taman Safari yang lain, Bali Safari ditata dengan nuansa kebudayaan Bali yang khas. Begitu wisatawan memasuki gerbang akan disambut dengan tiga 3 arca utama Tri Murti Brahma, Wisnu dan Siwa . Sepanjang perjalanan mengelilingi Bali Safari, wisatawan akan mendengarkan alunan gamelan Bali yang indah dan merdu.

Setiap sudut dari Bali Safari ini ditata dengan disain Bali disana sini, mulai

dari patung, sesajen, yang menggambarkan ciri khas Bali. “Mungkin inilah daya tarik Bali Safari dibandingkan dengan Taman Safari lainnya,” kata Bradley.

Bradley mengatakan, manajemen Bali Safari telah banyak melibatkan masyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomian setempat. Seperti, makanan binatang dipasok dari masyarakat sekitar, bahkan makan para pegawai Bali Safari melibatkan catering dari penduduk sekitar.

juga ada resort dimana tamu yang bermalam di sini dapat membaur dengan alam dan binatang yang mengelilingi resort tersebut. Ketika rombongan Komisi X DPR melintasi resort tersebut, tampak beberapa turis asing sedang menaiki gajah.

Kawasan ini juga dilengkapi dengan Bali Theatre, namun sayangnya rombongan Komisi X DPR tidak dapat menyaksikan pertunjukan tersebut karena hanya main setiap hari Jum’at, Sabtu dan Minggu.



Ketua Komisi X DPR Mahyuddin (kanan) saat berkunjung ke tempat wisata dalam serangkaian kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Bali

Selain itu, penduduk sekitar juga dapat menambah penghasilan dari souvenir-souvenir yang dijual. “Jadi antara pariwisata dan perekonomian di sini dapat berjalan seimbang,” kata Bradley.

Di dalam kawasan Bali Safari ini

Kapasitas Theatre ini 1.200 tempat duduk dengan dilengkapi teknologi multi media , suara dan pencahayaan yang serba canggih. Cerita yang diangkat mengenai sejarah dari Bali Agung. (tt) foto:tt/parle

Dinas Pendidikan Bali Diminta Sampaikan Perkembangan Data Sekolah

Komisi X DPR RI meminta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali untuk menyampaikan perkembangan data-data sekolah secara riil.

Data-data ini sangat diperlukan terkait dengan perjuangan Komisi X DPR dalam memperjuangkan anggaran bagi sekolah-sekolah yang memang memerlukan bantuan dari pusat.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dedi Suwandi Gumelar menyampaikan hal itu saat mengunjungi SMAN 6 Denpasar dalam acara kunjungan kerja Komisi X ke Provinsi Bali, Selasa (20/12).

Dedi menambahkan, data ini sangat diperlukan mengingat dalam kunjungan kerja yang waktunya sangat terbatas ini tidak mungkin semua sekolah dapat dikunjungi.

Data ini juga diharapkan dapat diberikan secara riil dengan memberikan fakta apa adanya kondisi sekolah-sekolah yang ada. Sebab, kata Dedi, sering jika anggota Dewan berkunjung ke satu daerah hal-hal yang disampaikan hanya yang baik-baik saja.

Menurut Dedi, penyampaian yang tidak transparan ini bahkan akan merugikan daerah itu sendiri, karena jika sekolah tersebut sudah baik tentunya

tidak memerlukan bantuan lagi.

Untuk itu Pak Kadis, seringkali memberikan data perubahan-perubahan supaya dari pusat bisa membantu didalam pola anggaran," kata politisi dari dapil Banten ini.

Dari hasil pantauan Komisi X DPR ke beberapa sekolah yang dikunjungi, sekolah-sekolah di provinsi ini kondisinya relatif baik. Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah di Jakarta pinggiran seperti Ciputat, Serpong atau di Provinsi Banten masih banyak ditemui sekolah-sekolah yang rusak berat. Bahkan di Provinsi Banten banyak bangunannya yang roboh.

Namun lain halnya dengan SDN 2 Serangan yang kondisinya cukup memprihatinkan, tentunya perlu dukungan dana dari pusat untuk memperbaikinya.

Dedi menambahkan, pola anggaran kita memang tidak efektif, hal itu disebabkan karena pertama, belum seluruhnya mengikuti amanah UU, dan ke dua, anggaran kita tidak berdasarkan research atau data yang akurat.

Sebagai contoh, sekolah yang se-

harusnya tidak perlu lagi mendapatkan bantuan malahan mendapat bantuan, sedangkan ada sekolah yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan. Jadi, katanya, sekolah yang baik tambah baik dan sekolah yang jelek tambah jelek.

Menurut Dedi, dia kurang setuju jika pola anggaran kita menganut azas pemerataan, yang adil pola anggaran kita harus menganut azas berkeadilan. Karena jika anggaran Papua disamakan dengan di Jawa jelas ini tidak berkeadilan.

Bagaimana bisa dikatakan berkeadilan, untuk merenovasi bangunan sekolah yang ditetapkan pagunya Rp 85 juta per kelas, pagunya sama seluruh Indonesia, sementara harga bahan bangunan seperti semen dan bahan-bahan lain harganya jauh berbeda dengan di Pulau Jawa.

Azas pemerataan ini tentunya dalam pelaksanaan di lapangan akan menjadi kendala karena kondisi masing-masing daerah yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda juga.

Disinilah perlunya dukungan data yang akurat dalam memberikan bantuan, dengan data yang lemah maka bantuan tersebut menjadi kurang tepat sasaran. (tt) foto:tt/parle



Anggota Komisi X DPR Dedi Suwandi gumelar



Komisi X DPR saat mengunjungi SMAN 6 Denpasar dalam acara kunjungan kerja komisi X DPR ke Provinsi Bali

DPR Terima Hasil Audit Forensik Century

DPR yang diwakili oleh para Pimpinan DPR, Marzuki Alie (Ketua DPR), Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua Bidang Korpolkam), Pramono Anung (Wakil Ketua Bidang Korinbang), Anis Matta (Wakil Ketua Bidang Korekku), Taufik Kurniawan (Wakil Ketua Bidang Korkesra), menerima hasil audit investigasi lanjutan atas kasus Bank Century dari BPK yang diwakili oleh Ketua BPK, Hadi Purnomo yang didampingi para wakil ketua BPK yakni, Taufiqurrahman Ruki, Hasan Bisri, dan Rizal Jalildi Ruang Rapat Pimpinan, Jum'at (23/12).

Dalam kesempatan tersebut, Hadi Purnomo membacakan ringkasan hasil audit investigasi atas kasus Bank Century. "Tujuan pemeriksaan investigasi lanjutan untuk meluruskan transaksi tidak wajar yang merugikan Bank Century, negara, ataupun masyarakat," jelasnya.

Hadi menjelaskan, dalam menyelesaikan laporan tersebut, BPK membutuhkan waktu 125 hari dari waktu yang diberikan 150 hari. "Jadi laporan BPK selesai lebih cepat 25 hari," tutur Hadi serentak disambut tepuk tangan para Pimpinan DPR.

Dalam pembacaan ringkasannya kepada DPR, BPK mengungkap terdapat 13 temuan baru yang menyangkut berbagai aspek. Temuan pertama, Dana hasil penjualan SSB US Treasury Strips BC sebesar USD 29,77 juta digelapkan oleh FGAH (Sdr. HAW dan Sdr. RAR). Temuan kedua, Transaksi pengalihan dana hasil penjualan SSB US Treasury Strips (UTS) BC sebesar USD 7 juta dijadikan deposito PT AI di BC dan merugikan BC. Temuan ketiga, SSB yang diperjanjikan dalam skema AMA sebesar USD 163,48 juta telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan.

Temuan Keempat, Dana hasil pencairan kredit kepada 11 debitur tidak digunakan sesuai tujuan pemberian kredit. Temuan kelima, Hasil penjualan aset eks jaminan kredit oleh PT TNS sebesar Rp 58,31 miliar dan Rp 9,55 miliar tidak disetor ke BC. Temuan Keenam, Pencairan margin deposit jaminan beberapa debitur L/C bermasalah dilakukan sebelum L/C jatuh tempo untuk keperluan di luar kewajiban akseptasi L/C. Temuan Ketujuh, Sdr. DT menutup ketekoran dana valas sebesar USD 18 juta



Jajaran Pimpinan DPR RI saat menerima hasil audit investigasi lanjutan kasus Bank Century dari BPK dengan deposito milik Sdr. BS nasabah BC. Temuan delapan, Sebagian dana valas yang diduga digelapkan Sdr. DT mengalir kepada Sdr. ZEM di tahun 2008 sebesar USD 392.110.

Temuan Sembilan, Aliran dana dari PT CBI kepada Sdr BM sebesar Rp 1 miliar. Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Temuan sepuluh, Penambahan rekening PT ADI di BC sebesar Rp 23 miliar tanpa ada aliran dana masuk ke BC. Temuan sebelas, Pemberian cashback sebagai kickback oknum BUMN/BUMD/yayasan. Temuan dua belas, Aliran dana BC sebesar Rp Rp 465,10 miliar kepada PT ADI dan nasabah PT ADI merugikan BC dan membebani PMS, dan Temuan terakhir, Aliran dana BC dari saudara AR tidak wajar, karena tidak ada transaksi yang mendasarinya.

Menanggapi penjelasan tersebut, Priyo Budi Santoso mengatakan, kemungkinan DPR akan meminta audit lanjutan atas temuan itu. "DPR tidak memiliki pesan khusus kepada BPK karena DPR percaya dengan sistem baku audit forensik yang dimiliki BPK

dan kami percaya dengan kredibilitas dari BPK,"katanya.

Selain 13 temuan tersebut, BPK juga membuka dua fakta penting, yakni, Aliran dana dari Sdr. SS dan Sdr. SL ke PT MNP. PT MNP adalah perusahaan yang dimiliki Sdr BS, dan Sdr SS (anak dari Sdr BS. PT MNP adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan media. Menurut penjelasan SS, PT IMA dan PT. SMS menerima dana dari Sdr SS dan Sdr SL sebesar Rp 100,95 milyar," papar Hadi.

Selanjutnya, Transaksi valas. Transaksi mengenai kas valas di BC Cabang Pondok Indah tidak ditemukan adanya transaksi penukaran kas valas sejumlah tersebut dan menurut pengakuan Sdr AFR, dia tidak pernah menerima fisik valas. Sementara itu, Sdr HEW dan Sdr SKS, menyatakan bahwa benar telah menukarkan dan menyetor uang sejumlah tersebut, "BPK belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan dan belum dapat menyimpulkan hubungan transaksi ini dengan kasus BC,"pungkas Hadi. (parle) foto: tim parle



Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012. 9 Januari 2012 (iv)



Kunjungan Kerja Komisi IX ke Manado, 20 Desember 2011 (sc)



Kunjungan Kerja Komisi IX ke Provinsi Banten, 20 Desember 2011 (spy)



Kunjungan Kerja Komisi X ke Provinsi Sumatera Utara, 20 Desember 2011 (as)



Kunjungan kerja Komisi VII ke Provinsi Bengkulu, 18 Desember 2011



Kunjungan Kerja Komisi X ke Bali, 20 Desember 2011 (tt)